

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan hubungan keagensian yang mengatur kerjasama dari *principal* yang memberikan perintah kepada suatu agen atau pihak manajemen untuk dilakukannya kegiatan operasional perusahaan yang beratas namakan *principal* dan memberikan hak pada pihak manajemen untuk pengambilan keputusan yang paling baik (Indriani & Rohman, 2022). Teori keagenan dapat mendukung terciptanya suatu pengendalian internal yang efektif dan efisien di dalam entitas kemudian dapat menghasilkan kegiatan bisnis entitas dengan bagus hingga dapat menjamin suatu integritas di dalam pelaporan dan dapat menciptakan suatu keuntungan bagi perusahaan juga pada para pemegang saham (Putra *et al*, 2021). Teori keagenan mengatakan bahwa audit internal memiliki fungsi sebagai suatu komponen yang penting untuk pengendalian internal yang termasuk kesatuan untuk tata kelola suatu perusahaan (Putra, 2021).

Menurut Mardianto & Tiono perbedaan akan kepentingan yang dialami oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu masalah pada agensi yang bisa menjadikan kecurangan suatu laporan keuangan. Perbedaan seperti pemegang saham ingin memiliki pengembalian yang besar atas investasinya, sementara manajer menginginkan hidupnya sejahtera melalui intensif dan bonus dari pemegang saham dapat memicu kecurangan demi tujuannya tercapai juga (Indriani & Rohman, 2022).

Menyembunyikan suatu informasi mengenai kecurangan tersebut juga akan memberikan kerugian informasi untuk pemegang saham (Widhayanti & Utomo, 2020). Teori keagenan ini memiliki 3 (tiga) landasan asumsi menurut Eisenhard (1989) dalam penelitian yang dilakukan oleh Oktaviane & Pohan (2022) yaitu antara lain *Self Interest* adalah umumnya manusia merupakan makhluk egois atau lebih mementingkan diri sendiri dibanding kepada orang lain, *Bounded rationality* yaitu setiap manusia memiliki daya pikir yang terbatas tentang persepsi untuk masa yang akan datang, dan kemudian adalah *Risk Averse* yang dimana setiap orang selalu ingin menghindari resiko.

Dari ketiga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap manusia melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri dan hal tersebut yang menyebabkan adanya kesempatan untuk berbuat curang demi kehidupan dan kepentingan setiap individu (Oktaviane & Pohan 2022).

2.1.2 Teori *Fraud Triangle*

Teori *Fraud Triangle* atau segitiga kecurangan merupakan teori yang mendasari terjadinya suatu kecurangan yang dilakukan oleh *fraudster* atau *perpreator* yang dimana *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (pembenaran) adalah tiga landasan utama yang membuat para pelaku kecurangan berkomitmen untuk melakukan kecurangan (Ridwan *et al*, 2021). Gejala yang timbul dalam bentuk *red flags* dapat menjadi acuan atau cara yang efektif dalam mencegah untuk terjadinya kecurangan dalam suatu organisasi, kemudian *red flags* tersebut dapat dilihat dan dicegah sejak dini jika memiliki sistem audit dapat diandalkan (Moyes *et al*, 2019).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan adalah keefektifan pengendalian internal, kultur organisasi, perilaku yang tidak etnis, gaya kepemimpinan, dan kepuasan atas kompensasi (Calsia, 2019).

Dikatakan bahwa faktor utama *fraud triangle* adalah tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Berikut merupakan penjelasan tentang ketiga faktor utama tersebut yang dikemukakan dalam penelitian terdahulu oleh Puspitaningrum *et al* (2019) :

1. *Pressure* (Tekanan)

Tekanan merupakan keinginan atau dorongan untuk berbuat atau melakukan kecurangan. Umumnya akan muncul karena suatu kebutuhan atau dapat timbul jika memiliki masalah keuangan, namun tidak sedikit pelaku kecurangan terdorong karena keserakahan.

2. *Opportunity* (Kesempatan)

Kesempatan merupakan suatu peluang untuk melakukan kecurangan. Untuk memiliki peluang atau kesempatan itu sendiri memiliki dua faktor yaitu sistem pengendalian internal yang lemah sehingga tidak mampu untuk melakukan penyidikan dan ketidakefektifan atas aktivitas pengendalian pada area yang beresiko, kemudian ada tata kelola organisasi tidak baik atau buruk yang dapat menyebabkan peluang untuk melakukan kecurangan.

3. *Rationalization* (Pembenaran)

Pembenaran yang dimaksudkan adalah untuk membenarkan aktivitas pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan tersebut. Pelaku kecurangan biasanya meyakini bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut merupakan

tindakan yang sesuai dengan haknya bahkan hingga pelaku merasa berjasas atas kecurangan yang dilakukan untuk membantu perusahaannya.

2.2 Teori Variabel X dan Y

2.2.1 Pencegahan Fraud

Fraud merupakan segala hal yang bersifat ilegal yang umumnya diketahui dengan tindakan penipuan, ancaman, serta penipuan suatu kebijakan atau kepercayaan. Umumnya dalam hal penipuan akan dilakukan oleh individu ataupun kelompok bahkan ada dalam suatu organisasi untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, properti, hingga suatu layanan untuk menghindari berbagai pembayaran dengan tujuan melindungi kegiatan bisnis yang dilakukan (Fahmi & Syahputra, 2019). *Fraud* juga dapat diartikan dengan suatu tindakan atau cara-cara yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan mengambil hingga menghilangkan harta ataupun uang dan hak milik secara sah yang dimiliki orang lain yang disebabkan oleh tindakan dan akibat yang fatal dari kegiatan itu sendiri (Alfian & Rahayu, 2019).

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Pramudyastuti (2022) mengatakan bahwa *fraud* memiliki metode untuk menyajikan klasifikasi dari beberapa bentuk *fraud* itu sendiri yang dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan antara lain :

1. *Asset Missappropriation* (Penyimpangan Atas Aset)

Penyimpangan atas aset adalah suatu bentuk pencurian atau pengambilan secara paksa hingga penyelewengan suatu aset atau harta yang dimiliki oleh suatu

perusahaan. Dalam golongan ini, *fraud* dapat diidentifikasi dengan mudah karena memiliki sifat yang dapat dihitung (*tangible*).

2. *Fraudulent Statement* (Salah atau Tiruan Pernyataan)

Salah atau tiruan pernyataan adalah suatu kegiatan kecurangan mengenai laporan keuangan yang dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kepentingan pada suatu perusahaan misalnya para petinggi atau dewan direksi perusahaan yang memiliki niat menyembunyikan keuangan ataupun informasi keuangan perusahaan secara aktual dengan merombak laporan keuangan yang ada dengan maksud untuk menggapai tujuan masing-masing atau diri sendiri.

3. *Corruption* (Korupsi)

Korupsi adalah suatu tindakan ilegal yang ditandai dengan penyalahgunaan kekuasaan yang telah didapatkan dari dukungan publik untuk memuaskan kepentingan pribadi. Jenis kecurangan ini merupakan jenis yang paling sulit untuk diketahui atau dideteksi karena adanya campur tangan pihak lain.

Seseorang terdorong untuk melakukan kecurangan umumnya memiliki beberapa faktor yang timbul dalam dirinya seperti yang dikemukakan oleh Jack *Bologne* GONE yang dijelaskan dalam penelitian Fatimah & Pramudyastuti (2022) adalah sebagai berikut :

1. Keserakahan (*Greed*)

Setiap orang dapat memiliki sifat serakah atau keserakahan yang berkaitan dengan masing-masing individu.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Dalam organisasi ataupun perusahaan pasti dapat menciptakan suatu kesempatan bagi individu hingga kelompok dapat melakukan kecurangan.

3. Kebutuhan (*Need*)

Faktor kebutuhan adalah faktor utama untuk mendorong seseorang melakukan kecurangan karena tuntutan kehidupan yang dijalani.

4. Pengungkapan (*Exposure*)

Faktor pengungkapan ini adalah faktor yang berkaitan atas pengungkapan aktifitas pelaku kecurangan melakukan kecurangan tersebut dan akan mendapatkan konsekuensi atas tindakan *fraud*.

Pencegahan terhadap *fraud* dapat dilakukan mulai dari pihak internal perusahaan terutama adalah seorang pimpinan perusahaan karena sikap dan tindakan seorang atasan atau pimpinan menjadi tolak ukur bagi anggotanya dalam melakukan sesuatu di perusahaan yang kemudian diinginkan dapat memberi contoh agar bersikap jujur dan bertanggung jawab dengan tugasnya. *Fraud* dapat dicegah dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk mempersempit kemungkinan terjadinya *fraud*. Unsur utama jika sudah terjadi kecurangan ialah menerapkan pengawasan yang berada pada pihak manajerial.

2.2.2 Audit Internal

Audit internal adalah upaya melakukan konsultasi yang bersifat objektif dan independen yang disusun sedemikian rupa untuk memberikan nilai lebih dalam kegiatan operasi suatu organisasi ataupun perusahaan (Ratri & Bernawati, 2019). *The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)* dalam penelitian oleh Fahmi

& Syahputra (2019) menyatakan bahwa audit internal merupakan peran yang sangat penting dan memiliki unsur tantangan untuk membantu setiap organisasi atau perusahaan agar berhasil dalam tujuannya. Peran audit internal wajib memahami suatu resiko keuangan perusahaan namun juga harus memahami setiap aspek organisasi atau perusahaan yang lebih luas untuk mendorong terjadinya peningkatan bisnis (Fahmi & Syahputra, 2019).

Dalam prosesnya, audit internal memiliki kewajiban dan wewenang untuk mengaudit atas tersedianya informasi mengenai aktivitas perusahaan untuk menilai berhasil atau tidaknya suatu sistem pengendalian internal yang dimiliki perusahaan dan juga dapat menilai kualitas pribadi karyawan suatu perusahaan atau organisasi (Fatimah & Pramudyastuti, 2022). Menurut Alfani & Rahayu (2019) audit internal memiliki beberapa tipe audit yaitu adalah sebagai berikut :

1. Audit Keuangan

Audit keuangan merupakan audit yang dilaksanakan untuk transaksi, catatan akuntansi suatu laporan keuangan dari setara departemen hingga laporan keuangan yang ada di pusat. Terhadap setiap aspek pengendalian, auditor harus memastikan suatu transaksi telah disajikan kedalam catatan akuntansi kemudian diungkapkan dalam laporan keuangan dengan akurat dan tepat.

2. Audit Non-Keuangan

Audit non-keuangan meliputi beberapa jenis audit yaitu sebagai berikut :

a. Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan ini dilaksanakan dengan tujuan menentukan apakah kegiatan di dalam perusahaan telah sejalan dengan hukum, prosedur, dan kebijakan yang telah dibuat oleh perusahaan dan pihak yang terikat oleh perusahaan. Auditor memiliki peran untuk memberi rekomendasi untuk perbaikan terhadap pengendalian dan prosedur yang dipakai untuk anggota bisa mematuhi peraturan yang telah dibuat.

b. Audit Kinerja

Audit kinerja merupakan audit yang digunakan untuk menentukan bagaimana perusahaan mengelola dan menggunakan sumberdaya mereka secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk memenuhi tujuan perusahaan itu sendiri. Pengelolaan sumberdaya tersebut meliputi kinerja anggota, prosedur, dan proses yang telah melaksanakan fungsi dari kebijakan tersebut.

c. Audit Pengadaan

Audit pengadaan merupakan salah satu peran audit internal yang memperhatikan pelaksanaan pengadaan barang maupun jasa yang ada disekitar perusahaan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh auditor internal antara lain adalah seluruh kegiatan pengadaan barang atau jasa yang berasal dari Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) hingga menyerah barang dan jasa yang diinginkan. Audit fisik adalah bagian yang ada di

audit kepatuhan dan menimbulkan keefektifan terhadap pencegahan untuk timbulnya kecurangan.

Menurut Sukrisno Agoes (2013:205) dari penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2020) audit internal memiliki tujuan utama yaitu untuk mendukung pemimpin atau pihak manajerial perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab dengan cara memberi penilaian, analisis, dan saran tentang kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan.

Kemudian adapun indikator yang digunakan untuk variabel audit internal adalah sebagai berikut (Khairunisa *et al*, 2023) :

1. Informasi keuangan dan operasi yang akurat.
2. Resiko yang dihadapi suatu organisasi atau perusahaan.
3. Peraturan dari pihak internal maupun eksternal.
4. Kriteria atas operasi yang dilakukan.
5. Sumberdaya yang ekonomis dan efisiensi.
6. Tujuan dari perusahaan itu sendiri.

2.2.3 Efektivitas Komite Audit

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tentang penerapan rapat yang dilaksanakan oleh komite audit yang dijalankan dengan cara bertahap paling sedikit satu kali dalam kurun waktu tiga bulan. Rapat yang dilakukan menjadi wadah untuk setiap komite audit dengan tujuan menjelaskan tentang mengawasi kegiatan dalam perusahaan. Maka dari itu, komite audit dilihat dengan cara

berapa banyak rapat yang dilakukan oleh suatu komite audit dalam setahun (Rianghepat & Hendrawati, 2021).

Komite audit merupakan komite yang disusun oleh Dewan Komisaris, yang bersifat bebas dari pengaruh manajerial perusahaan dan memiliki sifat independen serta memiliki kewajiban terhadap Dewan Komisaris untuk meningkatkan pemeliharaan Dewan Komisaris kepada kinerja suatu direksi perusahaan (Siahaan *et al* 2019). Menurut Effendi dari bukunya Pengaruh Audit Tenur, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan, Dan Komite Audit (2021:7) komite audit memiliki minimal 3 (tiga) anggota dari komisaris independen dan pihak luar perusahaan yang diketuai oleh dewan komisaris independen.

Komite audit memiliki peran dalam perusahaan untuk menjadi salah satu rencana guna meminimalkan kecurangan yang terjadi dalam perusahaan terutama untuk laporan keuangan perusahaan, jika perusahaan semakin banyak memiliki komite audit maka perusahaan bisa lebih cepat untuk menurunkan angka kecurangan yang mungkin akan terjadi di perusahaan (Tiapandewi *et al*, 2020). Dewan komite audit memiliki tanggung jawab atau tugas untuk memberikan beberapa pandangan mengenai masalah keuangan atau akuntansi, laporan keuangan serta penjelasannya, sistem pengendalian internal, dan auditor independen (Mustofa, 2020).

Pada tahun 2008 Komite Nasional Kebijakan *Governance* mengeluarkan sistem untuk pelaporan pelanggaran kecurangan yang berada di bawah komite audit dan kemudian hasil yang di dapatkan dari kegiatan pelaporan pelanggaran akan dieksekusi oleh audit internal. Efektivitas sistem dapat terlihat dari total kecurangan yang telah

berhasil diketahui kemudian akan memakan waktu untuk ditindak cenderung singkat dibanding dengan cara lain. Kemudian, seorang pemimpin dapat mengatasi masalah secara intern sebelum masalah tersebut merombak ke luar perusahaan yang mengakibatkan reputasi perusahaan terpengaruhi. Sistem yang dimaksud tersebut adalah sistem yang bernama *whistleblowing*. (Utami *et al*, 2019).

Adapun indikator yang digunakan untuk variabel komite audit adalah sebagai berikut (Komala & Assari, 2022) :

1. Independensi komite audit.
2. Kompetensi dan pengalaman yang dimiliki komite audit.
3. Transparansi serta komunikasi.

2.2.4 Pengendalian Internal

Kecurangan atau *fraud* yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi dapat terjadi karena pengendalian internal yang kurang efektif. Sistem pengendalian internal merupakan suatu prosedur yang mempengaruhi suatu tujuan organisasi dapat tercapai dengan cara efektif dan efisien kegiatan operasi, penyajian laporan keuangan yang terpercaya, ketertiban atas undang-undang dan kaidah yang berlaku didukung oleh jaminan yang terpercaya. Faktor-faktor dari pengendalian internal meliputi penialaian resiko, pengawasan dan pengendalian, lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, hingga informasi dan komunikasi (Rahman, 2020).

Untuk menggapai kinerja yang diharapkan, suatu perusahaan dan organisasi harus bisa menambah kinerja yang ada di perusahaan dengan cara memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan itu sendiri. Pengendalian internal dapat menambah

kemampuan untuk menganalisis pencapaian yang telah dihasilkan, hasil yang didapat dan kemampuan yang dimiliki dapat menuju pada suatu peningkatan kinerja finansial atau akuntabilitas perusahaan. Kemudian jika memiliki pengendalian yang lemah akan berpengaruh dalam kinerja manajemen yang tidak maksimal (Setiadi *et al*, 2021).

Pengendalian internal memiliki 4 (empat) elemen untuk upaya efisiensi dan efektivitas perusahaan yaitu struktur organisasi yang membedakan antara hak dan akuntabilitas, sistem organisasi dan proses pencatatan, praktek yang baik dan sehat, dan yang terakhir adalah anggota yang memiliki kinerja sesuai dengan tanggung jawab dan tugasnya (Sari *et al*, 2021).

Pengendalian internal mendapatkan dampak dari beberapa penyebab antara lain yaitu independensi yang bersifat objektif dan bebas dari campur tangan pihak lain yang ikut berkepentingan, motivasi atau dorongan untuk menggapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, pengalaman kerja yang memadai dan mampu menghasilkan suatu kinerja yang optimal dalam hal pengambilan keputusan, profesionalisme atas sikap yang dimiliki dan dipengaruhi oleh profesi, kewajiban sosial, memiliki sifat yakin terhadap ketentuan profesi, kemandirian, serta dalam hal hubungan sesama profesi, hingga memiliki gaya kepemimpinan yang memiliki ikatan dengan kemampuannya dalam memimpin dan mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Marciano *et al*, 2021).

Commite of Sponsoring Organization of The Treadway Commision (COSO) tahun 2013 dalam Ulum & Suryatimur (2022) memberikan arti dari pengendalian internal yaitu merupakan dampak yang ditimbulkan dari dewan direksi, pihak

manajemen, dan bagian dari perusahaan lainnya yang mengacu pada peristiwa yang sedang terjadi dalam memastikan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai, dan berikut beberapa tujuan perusahaan tersebut adalah :

1. *Performance / Operation Objectives*

Memiliki kegiatan yang efisien dan efektif dalam menggapai visi dan misi sebuah organisasi, misalnya penerapan standar kerja.

2. *Informational / Financial Reporting Objectives*

Menyerahkan suatu informasi yang tidak terikat, lengkap, andal, hingga tepat waktu mengenai suatu keuangan administrasi perusahaan, yang termasuk susunan laporan keuangan yang bisa diandalkan dan pencegahan terhadap kecurangan dan penyalahgunaan informasi publik.

3. *Compliance Objectives*

Peraturan, kaidah, dan hukum yang berlaku dalam suatu perusahaan dapat dipatuhi dengan baik. Pernyataan ini disusun dengan tujuan memastikan agar kegiatan perusahaan dapat mematuhi hukum atau undang-undang yang berlaku, peraturan pemerintah, hingga kebijakan dan kaidah internal.

Kemudian indikator yang memengaruhi kinerja pengendalian internal adalah sebagai berikut (Nusa, 2022) :

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian resiko
3. Pengendalian aktivitas

4. Informasi dan komunikasi
5. Tindakan pengawasan

2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai berikut :

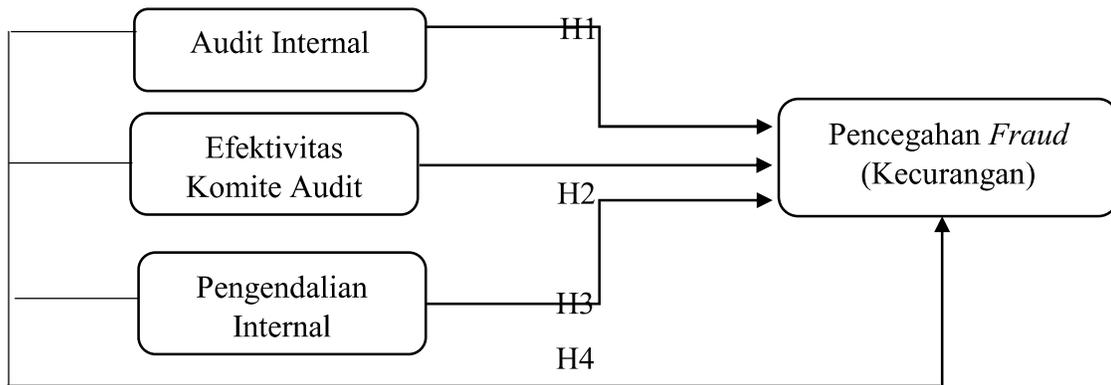
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mahendra <i>et al</i> (2021)	Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegah Kecurangan (Fraud) Pada Bank BUMN di Denpasar	Independen : Audit Internal (X1), Efektivitas Pengendalian Internal (X2) Dependen : Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Y)	Pengaruh audit internal dan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud)
2.	Tuti Meutia (2021)	Pengaruh Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pada Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Timur	Independen : Pengendalian Internal (X1), Komitmen Organisasi (X2) Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	1. Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> 2. Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .
3.	Rahman (2020)	Sistem Pengendalian Internal dan Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan	Indepen : Sistem Pengendalian Internal (X1), Peran Audit Internal (X2)	Sistem Pengendalian Internal dan Peran Audit Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan.

			Dependen : Pencegahan Kecurangan (Y).	
4.	Mardani <i>et al</i> (2020)	Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, dan Ukuran Perusahaan, Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI 2018	Independen : Komite Audit (X1), Audit Internal (X2), dan Ukuran Perusahaan (X3). Dependen : Pengungkapan Kecurangan (Y).	1. Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Kecurangan. 2. Audit Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Kecurangan. 3. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Kecurangan.
5.	Permatasari <i>et al</i> (2023).	Pengaruh Kualitas Auditor Internal dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Korupsi di BUMN.	Independen : Kualitas Auditor Internal (X1), Efektivitas Komite Audit (X2). Dependen : Korupsi (Y)	Kualitas Auditor Internal dan Efektivitas Komite Audit berpengaruh positif terhadap Pencegahan Korupsi.

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini memiliki 3 variabel yang akan diteliti yaitu Audit Internal, Komite Audit, dan Pengendalian Internal yang menjadi variabel independen dengan variabel dependen yaitu *Fraud* (Kecurangan). Berikut merupakan gambaran kerangka pemikiran yang dilakukan oleh peneliti berdasar penelitian yang dikembangkan :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Definisi dari hipotesis adalah suatu jawaban atau dugaan sementara yang akan digunakan untuk menyusun suatu teori atau hendak diuji kebenarannya melalui penelitian yang kemudian disusun berdasar pemahaman suatu proses, terutama mengenai landasan dan teori mengenai kasus dan kejadian yang menjadi objek suatu penelitian (Yam & Taufik, 2021). Kemudian dalam penelitian ini, penulis menerangkan tentang pengaruh yang terjadi terhadap variabel yang telah dipilih, sebagai berikut :

2.5.1 Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan Fraud

Audit internal memiliki peran untuk membantu suatu perusahaan dalam melaksanakan audit untuk kepentingan manajerial, mendukung usaha manajemen membangun kegiatan atau aktivitas berdasarkan etika, integritas, dan kejujuran. Auditor internal harus memiliki kualitas dan kemampuan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan profesional. Tanggungjawab dari auditor internal meliputi informasi yang disajikan dalam laporan harus memiliki

pertanggungjawaban dan laporan tersebut mengandung kewenangan milik audit (Fahmi & Syahputra, 2019).

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan (SPKN) No. 1 tahun 2017 dalam penelitian yang ditulis Mahendra *et al* (2021) auditor internal mempunyai peranan untuk melakukan pencegahan akan timbulnya suatu *fraud* atau kecurangan karena semakin kuat perilaku auditor internal untuk melakukan upaya pencegahan suatu kecurangan maka akan semakin berpengaruh signifikan untuk mengendalikan internal perusahaan. Auditor internal harusnya juga bisa memberikan solusi dan saran yang menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan jika ditemukan suatu kesalahan yang berkemungkinan akan menghasilkan kerugian bagi perusahaan (Fatimah & Pramudyastuti, 2022).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Fahmi & Syahputra (2019), Alfian & Rahayu (2019), Mahendra *et al* (2021), dan Fatimah & Pramudyastuti (2022) menyatakan bahwa audit internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Namun, menurut Mardani *et al* (2020) dan Akhtar *et al* (2022) menyatakan bahwa audit internal berpengaruh tidak signifikan terhadap pencegahan *fraud* (kecurangan).

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat diajukan rumusan untuk hipotesis pertama yaitu :

H₁ : Audit Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* di Bank BUMN Batam

2.5.2 Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap Pencegahan Fraud

Dalam perusahaan, komite audit dapat menjadi salah satu usaha atau upaya untuk mengurangi kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan terutama dalam laporan keuangannya (Tiapandewi *et al*, 2020). Komite audit dibentuk oleh suatu dewan komisaris untuk menjadi penengah antara agen dan principal guna melaksanakan tugas pengawasan atas aktivitas operasi perusahaan yang terhubung dengan penalaahan atas suatu informasi finansial, manajemen resiko, efektivitas audit internal dan eksternal, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap undang-undang yang ditetapkan (Mardani *et al*, 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan Utami *et al*, (2019), Mardani *et al*, (2020), dan Tiapandewi *et al*, (2020) memberikan pernyataan bahwa Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Tetapi, pernyataan ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachiatna *et al*, (2020) serta Maisaroh & Nurhidayanti (2021) yang menyatakan bahwa Komite Audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan untuk hipotesis kedua yaitu sebagai berikut :

H₂ : Komite Audit berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* di Bank BUMN Batam.

2.5.3 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud

Aktivitas pengendalian internal dipraktekan dalam rangka memberikan suatu jaminan yang layak untuk sasaran perusahaan agar dapat tercapai termasuk pencegahan

kecurangan (Adawiyah *et al*, 2023). Pengendalian internal sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap kecurangan dengan pengendalian resiko yang dilakukan. Hal ini karena pengendalian internal memiliki fungsi dalam melaksanakan evaluasi untuk seluruh sistem dan proses yang ditetapkan dan berlaku serta memastikan jika prosedur yang telah dibentuk dan ditetapkan telah dilakukan dengan baik dan benar (Marciano *et al*, 2021).

Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Mahendra *et al* (2021), Rahman (2020), Ulum & Suryatimur (2022), serta Andari & Ismatullah (2019) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* atau kecurangan. Namun ini berbanding terbalik dengan pernyataan oleh Komala & Piturungsih (2019), Adiko & Hafsah (2019), dan Tuti Meutia (2021) menyatakan bahwa Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* atau kecurangan.

Maka, dari pembahasan di atas dapat ditarik rumusan hipotesis sebagai berikut:
H₃ : Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* di Bank BUMN Batam.

2.5.4 Pengaruh Audit Internal, Efektivitas Komite Audit, Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud

Anggota, pihak manajemen, hingga atasan dalam sebuah perusahaan jika sudah memahami dan mengikuti peraturan atau kaidah yang telah dibuat oleh perusahaan untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan memungkinkan untuk tidak melakukan kecurangan. Perusahaan yang memiliki bagian audit internal dan komite audit akan

sangat memperkuat pencegahan terhadap *fraud* yang akan dilakukan oleh anggota perusahaan. Dalam pencegahan kecurangan pengendalian internal pun akan sangat berpengaruh kepada efektifitas jalannya prosedur perusahaan dan memiliki pengendalian yang baik maka akan efektif mencegah adanya peristiwa *fraud* atau kecurangan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Utami *et al* (2019), Mardani *et al* (2020), dan Rahman (2020) variable audit internal, efektivitas komite audit, dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat ditarik rumusan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Audit Internal, Efektivitas Komite Audit, dan Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*.